

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada BPKA di Kota Bandung)**

***THE EFFECT OF COMPETENCY OF HUMAN RESOURCES AND REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT ON THE QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT
FINANCIAL STATEMENTS
(Cases Study on BPKA in Bandung City)***

**Oleh:
Dwi Puspa Lestari
21116700**

Pembimbing : Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak., CA

**Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019**

email : puspalestaridwi@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Financial and Asset Management Agency in the City of Bandung. The problem that occurs at this time is that there are still weaknesses in the competence of human resources and management of regional finances that are not optimal so that it can reduce the quality of local government financial reports. This study aims to analyze and find out how much influence Human Resource Competencies and Regional Financial Management have on the Quality of Local Government Financial Reports.

The research method used is quantitative research using primary data collected directly by distributing questionnaires to employees of the Financial and Asset Management Agency as respondents. The population in this study were 30 employees in the Financial and Asset Management Agency in the city of Bandung. The sampling technique uses a saturated sample technique. Data analysis techniques using (SEM) PLS with the help of SmartPLS software.

The results of this study prove that the Competence of Human Resources and Management of Regional Finance have a significant effect on the quality of financial statements of the Regional Government in the Financial and Asset Management Agency in the City of Bandung.

Keywords: Human Resource Competence, Regional Financial Management, Quality of local government financial reports.

1. PENDAHULUAN

Di dalam Instansi pemerintahan, peran laporan keuangan sangat penting guna untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. (Erlina Rasdianto 2013:21).

Dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar dapat memberikan nilai pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada saat ini masih banyak kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah serta kurangnya kompetensi SDM dalam mengelola keuangan daerah. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Erlina, dkk. 2015: 8).

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. (Dadang Suwanda 2014:17). Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Adanya masalah terkait pendataan asset yang menjadi temuan BPK seperti kepemilikan asset yang telah tercatat di Pemerintah Kota Bandung, namun tidak ada

sertifikat. Menemukan asset tetap dan disajikan tanpa rincian luas dan lokasi alamat letaknya yang telah dikuasai oleh pihak ketiga serta belum lengkapnya dokumen yang mendukung (Kepala bidang akuntansi, Wawan Darmawan, 2018).

Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental, dan sosial. (Moeheriono 2014:14). Sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia, di mana proses pengambilan keputusan didasarkan pada informasi kebutuhan kompetensi individu untuk mencapai tujuan pada instansi pemerintah. (Sedarmayanti 2016:20). Sumber daya manusia sebagai pengguna pengelolaan keuangan dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi.

Adapun masalah yang terjadi pada Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah di Kota Bandung saat ini Kompetensi sumber daya manusia merupakan peran utama dalam segala kegiatan. Walaupun banyaknya sarana dan prasarana sumber daya yang ada, tanpa didukung kompetensi sumber daya manusia kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Kompetensi bisa ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan seseorang dapat diartikan masih banyaknya latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia yang berpengetahuan, berpengalaman dan keterampilan dalam membuat laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar **“Pengaruh**

Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

A. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2016:35) Kompetensi adalah sebagai karakteristik utama yang dimiliki seseorang, yang menyebabkan ia mampu berkinerja efektif atau unggul dalam sebuah pekerjaan.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2016:11) Sumber Daya Manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan, (bersifat teknis dan manajerial).

Maka dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu di suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai kinerja atau tujuannya yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh watak atau sikap kerja.

Menurut Moheriono (2014:14) menyatakan bahwa indikator kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Watak (*Traits*)
4. Motif (*Motive*)
5. Bawaan (*Self-concept*)

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:17) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah. Adapun dimensi indikator pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sudut pandang siklus pengelolaan keuangan, menurut Dadang Suwanda (2014:17) siklus

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pengawasan

C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan akhir dari proses pencatatan dari setiap transaksi-transaksi yang dilakukan. Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) laporan keuangan adalah Pengolahan data keuangan perusahaan diawali dari bukti-bukti transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota, kuitansi dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya dan kemudian dicatatkan dalam pembukuan perusahaan sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian bukti itu akan akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan. Selanjutnya menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:26) kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

Selanjutnya Indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Laporan Keuangan Daerah, menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:49) menyatakan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

A. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2002 : 146) sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu

Salah satu faktor yang mempengaruhi Jika kompetensi sumber daya manusia di laksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka bahwa seseorang yang memiliki kompetensi akan berkerja dengan pengetahuan dan keterampilan.

B. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2007:27) bahwa Kualitas dari hasil laporan keuangan tergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan.

Berdasarkan pada kajian teori yang ada dan telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

H1 :Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H2 :Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode deskriptif dan verifikatif dengan pedekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dan menguji kebenaran teori.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data primer , karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan menyebarkan kuesioner, dan responden. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan dua cara yaitu wawancara dan kuisisioner.

populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yang berjumlah 30 pegawai.

Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sebanyak 30 atau seluruh populasi pada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019.

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan (*Strutural Equation Model*- SEM) berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengujian uji validitas dan uji reliabilitas.

4. HASIL PENELITIAN

A. Hasil Analisis Deskriptif

1. Gambaran Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Berikut disajikan persentase mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di kota bandung.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Mengenai Kompetensi Sumber Daya
Manusia

No	Indikator	Item	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Pengetahuan	1	75	150	50,00%	Kurang Baik
2	Ketarampilan	1	107	150	71,33%	Baik
3	Watak	1	111	150	74,00%	Baik
4	Motif	1	92	150	61,33%	Cukup Baik
5	Bawaan	1	116	150	77,33%	Baik
Total		5	501	750	66,80%	Cukup Baik

Sumber : data olah kuisioner 2019

Berdasarkan dari tabel di atas secara keseluruhan dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 66,80%. Nilai 66,80% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2012:85) tergolong cukup baik, sehingga dapat terlihat bahwa kompetensi sumber daya manusia pada saat ini termasuk kedalam kategori cukup baik sedangkan sisa persentase kesenjangan (*gap*) sebesar 33,20%, yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang perlu di perbaiki kedepannya mengenai kompetensi sumber daya manusia, salah satunya seperti yang berkaitan dengan pengetahuan dan motif.

2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Berikut disajikan persentase mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di kota bandung.

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah

No	Indikator	Item	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Perencanaan	1	102	150	68,00%	Cukup Baik
2	Pelaksanaan	1	110	150	73,33%	Baik
3	Penatausahaan	1	89	150	59,33%	Cukup Baik
4	Pelaporan	1	103	150	68,67%	Baik
5	Pertanggungjawaban	1	108	150	72,00%	Baik
6	Pengawasan	1	94	150	62,67%	Cukup Baik
Total		6	606	900	67,33%	Cukup Baik

Sumber : data olah kuisioner 2019

Berdasarkan dari tabel di atas secara keseluruhan dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 67,33%. Nilai 67,33% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2012:85) tergolong cukup baik, sehingga dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah pada saat ini masih tergolong cukup baik.

Sehingga terlihat bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 67,33% yang termasuk kedalam kategori cukup baik sedangkan sisa persentase kesenjangan (*gap*) sebesar 32,67%, yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang perlu di perbaiki kedepannya mengenai pengelolaan keuangan daerah, salah satunya seperti yang berkaitan dengan penatausahaan sesuai dengan fenomena bahwa indikator penatausahaan bermasalah yaitu yang terjadi dilapangan bahwa arsip atau dokumen-dokumen tidak lengkap.

3. Gambaran Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berikut disajikan persentase mengenai Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di kota bandung.

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden
Mengenai Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Item	Skor Aktual	Skor Ideal	(%)	Kriteria
1	Relevan	1	89	150	59,33%	Cukup Baik
2	Andal	1	102	150	68,00%	Cukup Baik
3	Dapat dipahami	1	106	150	70,67%	Baik
4	Dapat dibandingkan	1	106	150	70,67%	Baik
Total		4	403	600	67,17%	Cukup Baik

Sumber : data olah kuisioner 2019

Berdasarkan dari tabel di atas secara keseluruhan dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 67,17%. Nilai 67,17% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Umi Narimawati (2012:85) tergolong cukup baik, sehingga dapat diketahui bahwa kualitas laporan

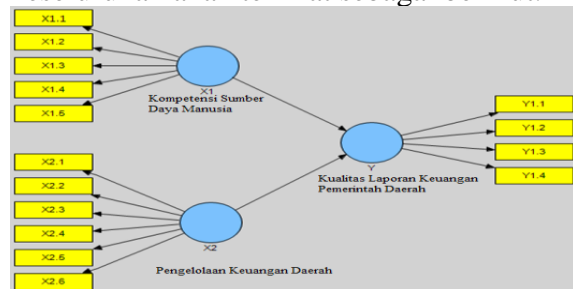
keuangan pemerintah daerah pada saat ini masih tergolong cukup baik.

Sehingga terlihat bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 67,17% yang termasuk kedalam kategori cukup baik sedangkan sisa persentase kesenjangan (*gap*) sebesar 32,83%, yang menunjukkan bahwa masih ada permasalahan yang perlu di perbaiki kedepannya mengenai kualitas laporan keuangan, salah satunya seperti yang berkaitan dengan relevan.

B. Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis yang diajukan mengenai analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel laten dan 15 variabel manifes yakni dari kompetensi sumber daya manusia (X_1) terdiri dari 5 variabel manifes, pengelolaan keuangan daerah (X_2) terdiri dari 6 variabel manifes dan kualitas laporan keuangan (Y) terdiri dari 4 variabel manifes. Jika digambarkan dalam struktur secara keseluruhan akan terlihat sebagai berikut.

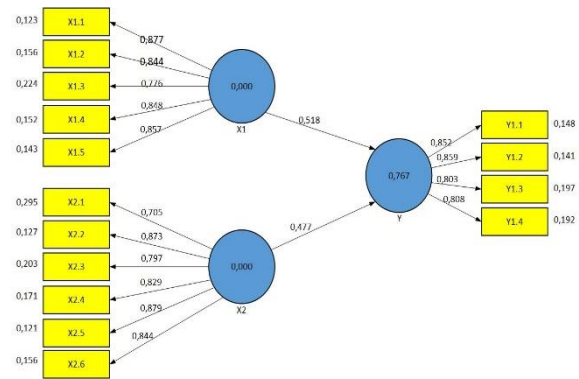


Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Gambar 4.4

Struktur Analisis Variabel Penelitian secara Keseluruhan

Berikut hasil perhitungan berdasarkan indikator dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS* 2.0 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

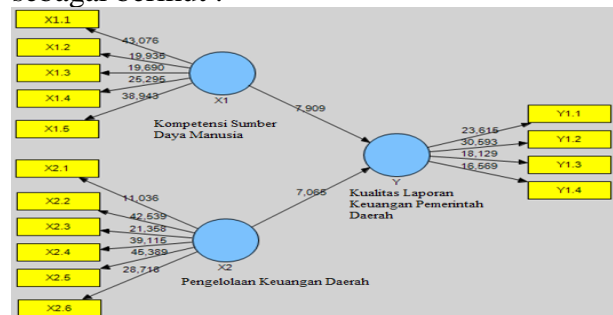
Gambar 4.5

Diagram Jalur Model Lengkap/Nilai Path Coefficient

Adapun hasil persamaan model struktural dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,518X_1 + 0,477X_2 + \zeta$$

Dari persamaan tersebut, diperoleh nilai koefisien jalur struktural variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) lebih besar dari variabel pengelolaan keuangan daerah (X_2), yang mengindikasikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) memiliki pengaruh lebih besar dari pada pengelolaan keuangan daerah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Jika digambarkan, model tersebut dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Gambar 4.6

Nilai Path Coefficient

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan kontribusi pengaruh sebesar 40,4% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36,3% terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Berdasarkan tabel, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh yaitu sebesar 76,7%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) memberikan pengaruh sebesar 76,7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan sisanya sebesar 23,3% merupakan pengaruh dari factor lain yang tidak diteliti.

1. Analisis Koefisien Korelasi

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa nilai dari korelasi sebesar 0,780 yang berarti kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa nilai dari korelasi sebesar 0,761 yang berarti pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Koefisien Determinasi

Adapun hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil dari kontribusi kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh sebesar 40,4% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa 40,4% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia sedangkan sisanya sebesar 59,6% yang artinya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa hasil dari kontribusi pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 36,3% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa 36,3% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 63,7% yang artinya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh X_1 terhadap Y (Hipotesis 1)

H_0 : Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H_1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

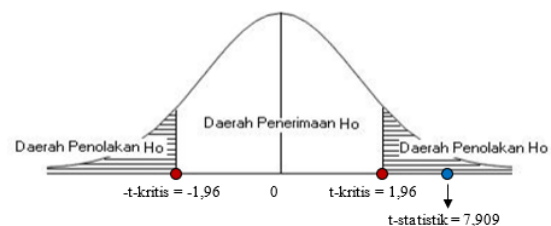
Tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{statistik} > t_{kritis}$ atau $-t_{statistik} < -t_{kritis}$

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.38
Parsial Variabel X_1 terhadap Y

Latent Variabel	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	0,518	7,909	1,96	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS



Gambar 4.7 Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1

Berdasarkan hasil penelitian $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh nilai sebesar 7,909. Nilai ini lebih besar dari 1,96 dengan $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan kontribusi sebesar 40,4%, yang

menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima.

**b. Pengaruh X₂ terhadap Y
(Hipotesis 2)**

H₀ : Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

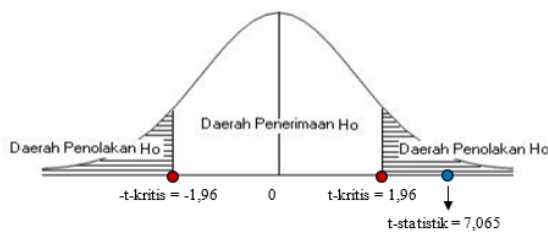
H₁ :Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tolak H₀ dan terima H₁ jika nilai $t_{statistik} > t_{kritis}$ atau $-t_{statistik} < -t_{kritis}$

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Parsial Variabel X₂ terhadap Y

Latent Variabel	Koefisien Jalur	t _{statistik}	t _{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X ₂ -> Y	0,477	7,065	1,96	H ₀ ditolak	Signifikan



Berdasarkan hasil penelitian, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel Pengelolaan Keuangan Daerah X₂ diperoleh sebesar 7,065. Nilai ini lebih besar dari 1,96 dengan $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan menerima H₁, artinya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan kontribusi sebesar 36,3%, yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima.

4.1 Pembahasan

A. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara nilai dari korelasi antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah terdapat kriteria kuat dengan arah hubungan positif yang menunjukan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,780 yang berarti kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan yang kuat dan memiliki arah positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana semakin tinggi penerapan kompetensi sumber daya manusia maka pelaksanaan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas.

Dapat dijelaskan dari hasil Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 40,4% sedangkan sisanya sebesar 59,6% yang artinya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti pemanfaatan teknologi informasi , sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah.

B. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara nilai dari korelasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat kriteria kuat dengan arah hubungan positif yang menunjukan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sebesar 0,761 yang berarti pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki arah positif dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana yang menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 36,3% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa 36,3% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 63,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas menyatakan bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara persial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya kualitas dari hasil (*outcome*) pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan

5.1 KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan

Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung, artinya semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

➤ Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang belum berjalan secara optimal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran pada pemerintah agar dapat meningkatkan pemahaman setiap pegawai di instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja di instansi pemerintah yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pegawainya. Selain itu pemerintah juga disarankan adanya perbaikan mengenai indikator pengetahuan yang masih terlihat adanya masalah dan sebaiknya lebih memperhatikan kompetensi sumber daya manusia terutama bagian keuangan yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah agar diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga dapat meningkatkan kinerja di instansi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum berjalan secara optimal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik harus adanya kontrol dari pemerintah yaitu dengan cara membuat database pengarsipan dokumen atau

sertifikat yang belum lengkap dan di cek langsung oleh pimpinan.

➤ **Saran Akademis**

Disarankan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca. Sehingga hasil penelitian ini dapat disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan menggunakan variable lain di luar variable ini dan unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum dan luas. Adapun untuk mengumpulkan data yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung pada karyawan. Adapun hambatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti sulit mendapatkan data kuesioner yang telah di bagikan ke karyawan, sulit mendapatkan perijinan observasi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk tempat penelitian yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih banyak untuk mencegah hambatan dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta
- Anto Darmanto. 2016. *Pemprov Jabar Terkendala SDM Sajikan Laporan Berbasis Akrua*. Melalui: <https://bandung.pojoksatu.id/read/2016/06/06/pemprov-jabar-terkendala-sdm-sajikan-laporan-berbasis-akrua/>.
- Arman Syifa. 2017-2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070>
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Barker, Chris et al. (2002). *Research Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd, England.
- Budhi Rukmana 2018. *BPK Kejar WTP, Pemkot Bandung Kebut Tertibkan Aset*. Melalui: <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3955552/kejar-wtp-pemkot-bandung-kebut-tertibkan-aset>.
- Dadang Suwanda & Hendri Santosa. 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Desy Sefri Yensi. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*, (Volume 1 No. Tahun 2014).
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian
- Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)*, (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
- Lilis Puspitawati, Cindy Nadya Reza, *Analisis Peningkatan Intellectual Capital Performance Dan*

- Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Program Studi Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia)*, (Volume 6 No.1, Juli 2012).
- Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Depok. PT Raja grafindo Persada.
- Marwansyah. 2016 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta. Edisi kedua.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nikke Yusnita Mahardini. *Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015*.(Volume 5 No.1 Tahun 2018).
- Rahmi Syifa Alifa. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Pasundan Bandung.
- Siska Yulia Defitri. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Tahun 2017).
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT Rafika Aditma.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2011. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Tissa Nurul Husna. *Pengaruh Kompetensi sumber Daya Manusia Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada SKPD KotaPekanbaru)*, (Volume 4 No.1 Tahun 2017).
- Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
- Umi Narimawati . 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.
- Wawan Darmawan. 2018. *Kepala bidang akuntansi*.
- Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

V.Wiratna Sujarweni.2017.*Analisis
Laporan Keuangan*. Pustaka Baru
Press, Yogyakarta